

The Public Resistance, Anachronism, and the Role of Religious Elite: Mitigation Spread of Covid-19 in Pesantren

Nurul Azizah

Universitas Ibrahimy
nurulazizah@ibrahimiy.ac.id

Mohammad Armoyu

Universitas Ibrahimy
marmoyu@ibrahimiy.ac.id

Abstract

The fundamentally religious elite has high power legitimacy in the community, especially in the Pesantren, namely Kiai is considered a person who has high religious science, so the Kiai fatwa has a significant effect influence on changes in behavior and compliance of santri and society. Now the digital era, public spaces are open-minded, so there is a tendency to transformations paradigms of religious thinking, culture, and tradition into interesting objects of conversation. So two tendencies are accommodative society and resistant publics. In the context of different interpretations, religion becomes no longer elitist, absolute, and contestation. This study aims to explanations of public resistance and the role of the religious elite to anticipate the spread of covid-19 in pesantren. This study results of interviews, observations, and analysis of descriptive qualitative research data show: First, there is a paradigm of community anachronism towards religion and culture, there is public resistance to the rules set by the government. Second, the role of the religious elite and religious fatwas were successfully applied in pesantren and community groups that have client patron relationships. The dissemination of information is very effective through social media. Third, government regulations on restrictions on community activities and socialization of religious elite fatwas are considered less effective to suppress community resistance efforts. Recommendations this study suggests the need for synergy between the religious elite and the government, to grow the rationality of society towards religious and cultural understanding, not to orthodox thinking, especially in this covid-19 pandemic.

Keywords: anachronism, religious elite, public resistance, fatwa Kiai

Abstrak

Secara fundamental peran elite agama memiliki legitimasi simbolik tertinggi di masyarakat khususnya kawasan pondok pesantren, yakni Kiai dianggap orang yang memiliki keilmuan agama yang tinggi, sehingga fatwa kiai mempunyai pengaruh besar terhadap perubahan perilaku dan kepatuhan santri dan masyarakat. Di zaman digital sekarang ini, ruang publik terbuka luas, sehingga ada kecenderungan transformasi paradigma berfikir agama, budaya dan tradisi menjadi objek pembicaraan menarik. Sehingga terdapat dualisme kecenderungan yakni masyarakat akomodatif dan masyarakat yang resisten. Pada konteks interpretasi yang berbeda, maka agama menjadi tidak lagi elitis, absolut dan kontestatif. Tujuan dari tulisan ini untuk mengkaji aksi perlawanan masyarakat dan peran elite agama untuk mengantisipasi penyebaran covid-19 di pondok Pesantren. Berdasarkan dari hasil wawancara, observasi, dan analisis data penelitian kualitatif deskriptif, menunjukkan bahwa: Pertama, ada paradigma anakronisme masyarakat terhadap agama dan budaya, muncul aksi perlawanan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah. Kedua, Peran elite agama dan fatwa agama berhasil diaplikasikan dikawasan pesantren dan masyarakat yang memiliki hubungan patron klien. Penyebaran informasi sangat efektif melalui media sosial. Ketiga, peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan sosialisasi fatwa elite Agama dirasa kurang efektif untuk menekan upaya perlawanan masyarakat. Tulisan ini menyarankan perlunya sinergisitas antara elite agama dan pemerintah, sehingga mampu meningkatkan rasionalitas masyarakat terhadap pemahaman agama dan budaya, tidak terjebak dalam pemikiran ortodok apalagi dimasa pandemi covid-19.

Kata Kunci: Anakronisme, elite agama, resistensi publik, fatwa kiai

Pendahuluan

Aksi resistensi publik dan anakronisme masyarakat dimasa pandemi covid-19 ini, terjadi karena karena beberapa faktor yakni faktor struktural maupun kultural. Faktor kultural meliputi rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan, serta upaya pembangkangan terhadap peraturan-peraturan. Sedangkan faktor struktural antara lain disebabkan kekurang sigapan pemerintah dalam upaya merespon penyebaran covid-19. Maka dari itu, peran elite agama menjadi sangat penting sebagai upaya mitigasi

penyebaran covid-19 di pesantren maupun di masyarakat secara luas¹. Hampir secara global virus covid 19 ini menyerang, ada Global 225 Negara di dunia, yang terkonfirmasi 244.897.472, Meninggal 4.970.435, sedangkan di Indonesia data per tanggal 28 oktober 2021, tercatat data Positif 4.242.532, data Sembuh 4.086.759 dan yang meninggal ada 143.333². Dari sebaran data itu, semoga masyarakat semakin memiliki kesadaran, sehingga mampu menurunkan aksi resistensi masyarakat dengan mematuhi semua peraturan seperti memakai masker, menjaga sosial distancing, menghindari kerumunan dan rajin mencuci tangan, dan melakukan vaksinasi.

Literature Literatur yang ada saat ini cenderung mengkaji beberapa hal sebagai berikut: Pertama, peran tokoh agama membantu memutus mata rantai penularan covid 19 di masyarakat, yang kedua, meningkatnya nilai-nilai rasionalitas objektivitas terhadap realitas yang terjadi dilingkungan, serta mampu berfikir fleksibilitas, sedangkan yang ketiga adanya musibah pandemi covid-19 memaksa elit agama mampu beradaptasi dengan lingkungan baru dengan memanfaatkan media internet untuk berdakwah dan memberikan fatwa, sehingga mampu mengurangi intensitas pertemuan langsung dengan jamaah yang berjumlah besar. Sehingga sebagian elit agama mengadakan pertemuan online dan pembatasan kuantitas pertemuan langsung³. Dari studi literatur yang ada saat ini terdapat keterbatasan studi yang secara khusus mengkaji tentang bagaimana aksi perlawanan publik terhadap kebijakan pemerintah dan bagaimana peran kiai sebagai tokoh agama bersama-sama masyarakat mampu membantu memutus mata rantai penularan covid-19 di pesantren dan di masyarakat.

Studi ini secara khusus bertujuan untuk menganalisa perilaku kontraproduktif masyarakat Indonesia saat pandemi covid-19. Sejalan dengan hal ini, tiga pertanyaan dijawab dalam riset ini. Ini mengkaji (1) Bagaimanakah anakronisme masyarakat terhadap agama dan budaya, dapat memunculkan aksi perlawanan masyarakat terhadap aturan yang ditetapkan pemerintah?, (2) faktor –faktor apakah yang didapatkan dari peran elite agama dan fatwa agama berhasil diaplikasikan dikawasan pesantren dan masyarakat yang memiliki hubungan patron klien. Penyebaran informasi sangat efektif melalui media sosial. (3) bagaimana implikasi dari peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan sosialisasi fatwa elite Agama dirasa kurang efektif untuk menekan upaya perlawanan masyarakat.

Studi ini disusun berdasarkan asumsi mendasar yaitu, adanya pertama, paradigma subjektivitas dalam pemikiran tradisional tetap bersih kukuh mempertahankan tradisi yang ada, sehingga menimbulkan permasalahan baru dalam mensikapi fenomena yang terjadi saat ini era pandemi covid-19. Yang kedua upaya menjawab tantangan zaman, sebageian ulama melakukan adaptasi dengan meningkatkan kemampuan teknologi yakni memberikan fatwa dan berdakwah melalui jaringan internet. Seperti ditampilkan diberbagai media sosial seperti Instagram, facebook, live streaming, you tube, dan sebagainya. Yang ketiga peran kiai selaku tokoh agama untuk memberikan tauladan bagi masyarakat seperti melakukan vaksinasi, menerapkan protokol kesehatan.

¹ Sima Barmania and Michael J. Reiss, "Health Promotion Perspectives on the COVID-19 Pandemic: The Importance of Religion," *Global Health Promotion* 28, no. 1 (2021): 15–22, <https://doi.org/10.1177/1757975920972992>.

² Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Data Sebaran, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 19–22 (2021).

³ Subakhi Kusuma Dewi, "December 2020," *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.36548/jismac.2020.4>; Rob Cover, "Identity in the Disrupted Time of COVID-19: Performativity, Crisis, Mobility and Ethics," *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021): 100175, <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100175>; Fahad D. Algahtani et al., "Coping during Covid-19 Pandemic in Saudi Community: Religious Attitudes, Practices and Associated Factors," *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021, <https://doi.org/10.3390/ijerph18168651>; Qaisar Khalid Mahmood et al., "A Cross-Sectional Survey of Pakistani Muslims Coping with Health Anxiety through Religiosity during the COVID-19 Pandemic," *Journal of Religion and Health*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01218-5>.

Metode

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, perspektif fenomenologi⁴. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang mempunyai tujuan untuk mengetahui dan memahami semua yang dialami oleh subjek penelitian (Ali 2017; Siswati 2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dengan melalui indept interview, melakukan observasi, dan menganalisis agar memperoleh kumpulan data akurat. Pada penelitian ini ada fenomena anakronisme publik di masa pandemi covid 19, tetapi sebagian lagi terdiri dari masyarakat akomodatif, masyarakat yang mampu berfikir fleksibel dan logis, mampu beradaptasi dengan keadaan terkini. Sehingga transformasi perilaku masyarakat terjadi yang melahirkan menjadi habitus-habitus baru.

Lokasi penelitian ini adalah di pondok pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, KHR. Azaim Ibrahimy sebagai pengasuh pesantren saat ini. Beliau adalah pengasuh keempat, sekaligus pendiri dan pembina Majelis Dzikir Basmalah dan Jamiyah Shalawat Bhenning yang bergerak di seputar dakwah offline maupun online yang disebar luaskan melalui media sosial seperti youtube, instagram, twitter, facebook, S3TV.

Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan data primer dan dari data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil kegiatan wawancara langsung secara mendalam antara peneliti dan subjek penelitian, sedangkan data sekunder diperoleh dari sekumpulan data pendukung untuk memperkaya khasanah hasil penelitian.

Metode analisa data pada studi ini memanfaatkan pendekatan analisa informasi Antonia Gramsci⁵. Serta memakai penyajian informasi Miles serta Huberman⁶. Model analisis Miles serta Huberman ini ialah proses analisis interaktif yang berupa siklus. Sehingga sanggup mengatakan kenyataan kalau dalam kegiatan analisis informasi kualitatif sering dicoba secara interaktif, serta berlangsung secara berkesinambungan sampai tuntas sempurna. Metode analisis ini terdiri dari 3 elemen adalah; reduksi informasi, penyajian informasi serta penarikan dan uji kesimpulan⁷.

Hasil Pembahasan

Anakronisme Dampak Ketidakpercayaan Masyarakat Terhadap Pemerintah

Pengertian anakronisme adalah penempatan peristiwa, tata latar (setting), tokoh maupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu. Joyce Dalsheim menulis artikel yang berkaitan dengan anakronisme di Israel dan Palestina⁸. Dalsheim mempunyai gagasan bahwa anakronisme dapat mengganggu pemikiran tentang keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan manusia. Dalam kasus Israel / Palestina gagasan anakronisme dikerahkan di kalangan liberal, progresif dan teoretikus radikal, dan aktivis yang mencari perdamaian dan keadilan sosial yang mengekspresikan permusuhan terhadap pemukim bermotivasi agama dan proyek pemukiman mereka. Salah satu cara di mana mereka membedakan diri dari para pemukim ini adalah dengan menyarankan bahwa tindakan pemukim adalah milik masa lalu. Palestina dipahami sebagai pihak yang terjebak dalam sistem menindas kolonialisme pemukim yang juga milik masa lalu, mencegah mereka dari bergerak maju. Kedua persepsi anakronisme membatasi cara kita

⁴ Tjipto Subadi, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Erlina Farida Hidayati, 1st ed. (Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2006).

⁵ John W Creswell, *Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Design Fourth Edition*, Sage Publications, 2014.

⁶ A. Michael Huberman Miles, Matthew B, *Qualitative Data Analysis*, SAGE Publications, 2nd ed., vol. Second Edi (California, 1994).

⁷ Matthew B Miles, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook. Third Edition, The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods*, 2014.

⁸ Joyce Dalsheim, "Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation," *Theory, Culture & Society* 30, no. 3 (2013): 29–60, <https://doi.org/10.1177/0263276412460697>.

dapat berpikir tentang pembebasan manusia dan perdamaian. Artikel ini menyoroti teka-teki tentang siapa atau apa yang menjadi milik masa lalu, dan bagaimana berpikir dalam istilah seperti itu dapat berkontribusi pada produksi kolektif moral tertentu dan produksi permusuhan .

Huebner, Daniel R juga meneliti tentang Anakronisme prespektif sosiologis⁹. Makalah ini memberikan perspektif baru tentang pertanyaan-pertanyaan "anakronisme" dengan bantuan historiografi dan pragmatisme. Historio membuat kasus tentang bagaimana masa kini dialami sebagai beberapa temporalitas, bagaimana pengertian anakronisme bergantung pada dinamika identifikasi tubuh dengan orang lain yang historis, dan bagaimana pengertian ini dapat menjadi strategi hermeneutik yang provokatif daripada topik yang harus dihindari . Kaum pragmatis menunjukkan bagaimana anakronisme muncul sebagai rasa keterkejutan yang ditempatkan secara sosial dan diwujudkan dalam menghadapi jejak tertentu dari masa lalu di masa kini aktor, dan bagaimana kejutan ini dapat mendorong analisis ke masa lalu yang memanfaatkan komitmen nilai peneliti sebagai sumber daya dalam penyelidikan sosiologis. Makalah ini berusaha membangun alat konseptual untuk hermeneutika pragmatis yang dapat memperkuat akurasi penyelidikan kami terhadap peristiwa sejarah tertentu dan proyek etis dan politik kami yang inklusif secara demokratis untuk merekonstruksi sejarah yang dapat digunakan¹⁰ .

Maraknya aksi perlawanan publik akibat adanya pembatasan sosial masyarakat yang diterapkan oleh pemerintah. Terjadinya aksi perlawanan masyarakat setelah muncul aturan yang ditetapkan pemerintah. Perlawanan publik bisa dilihat sebagai aksi resisten terhadap ketidakadilan dan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi aksi anakronisme dimasa pandemi saat ini yaitu;

Tabel 1. Faktor-Faktor Anakronisme di Masa Pandemi Covid-19

- 1 Saat pertama kali ditemukan kasus covid-19 di Indonesia, masyarakat sudah mulai melihat informasi yang tidak valid antara data yang disampaikan pemerintah dengan fakta yang terjadi dilapangan. Sehingga masyarakat kebingungan dan muncul ketidakpercayaan publik, sehingga masyarakat menjadi bingung dan lebih parahnya lagi marak informasi hoak yang semakin menambah kepanikan ditengah masyarakat:
 - 2 Kurangnya koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terkesan kebijakannya berjalan sendiri-sendiri, bahkan ironisnya kebijakan yang diterapkan di daerah tidak sejalan dengan pemerintah pusat, sehingga menimbulkan permasalahan yang cukup pelik di masyarakat.
 - 3 Masyarakat melakukan perlawanan karena mencontoh perilaku pejabat yang tidak taat terhadap kebijakan pembatasan sosial. Seperti pejabat yang mengadakan resepsi pernikahan, padahal masyarakat dilarang melakukan kegiatan keagamaan di tempat ibadah, pasar dibuka desangkan masjid dilarang buka. Hal-hal inilah yang membuat masyarakat melakukan aksi perlawanan
- Resistensi publik terjadi karena relasi antara pemerintah dengan tokoh atau partisan organisasi non pemerintah

⁹ Daniel R. Huebner, "Anachronism: The Queer Pragmatics of Understanding the Past in the Present," *American Sociologist*, 2021, <https://doi.org/10.1007/s12108-021-09509-w>.

¹⁰ A.R. García, "Koselleck and the Margins of History: Anachronism, Memory, Latency | Koselleck y Los Márgenes Estéticos de La Historia: Anacronismo, Memoria y Latencia," *Revista de Historiografía*, 2021, <https://doi.org/10.20318/revhisto.2020.5830>; Erag Ramizi, "Anachronic Potentialities," *Diacritics* 48, no. 2 (2020): 4–16, <https://doi.org/10.1353/dia.2020.0007>; Nancy armstrong, "Realism and Anachronism," *Novel, Inc*, 2020, <https://doi.org/10.1215/00295132-8309497>.

- 4 Tidak ada penerapan sanksi secara tegas dalam bentuk peraturan, undang-undang atau surat keputusan secara formal, tetapi ada informasi yaitu sanksi sosial di sekitar masyarakat.
- 5 Harusnya pemerintah pusat mengajak masyarakat terlibat langsung sehingga tercipta civic engagement untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Karena dengan terbangunnya social trust maka akan melahirkan pemerintah pusat dan daerah perlu memperbaiki civic engagement dengan masyarakat. Social trust berdampak positif terhadap peningkatan partisipasi publik. Diharapkan pemerintah selalu mengedepankan data transparansi, akuntabel, dan menjamin kebebasan berpendapat, serta menjamin keadilan dalam keberagamaan. Kunci utamanya hanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Sumber: CSIS Indonesia¹¹

Seringkali terjadi delegitimasi kebijakan, misalnya pemerintah mengeluarkan peraturan melarang beribadah ditempat-tempat suci umat beragama, seperti sholat di Masjid, Gereja bagi umat kristen, Wihara dan Pura selama masa pembatasan sosial dimasa pandemi covid. Tetapi masih terjadi aksi perlawanan di masyarakat. Misalnya pelarangan membuka masjid dengan alasan protokol kesehatan dan mencegah penularan virus covid-19. Pemerintahpun diinterpretasikan mendiskreditkan agama-agama tertentu.

Hal ini marak terjadi diseluruh wilayah, termasuk kasus aksi penolakan penutupan masjid dan pengambilan jenazah covid-19 secara paksa oleh masyarakat. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) diberlakukan untuk mengantisipasi penularan covid-19. Salah satu kebijakan pemerintah yaitu menutup tempat-tempat ibadah seperti masjid, gereja, wihara, pura, dan tempat-tempat publik lainnya. Bagi umat Islam, penutupan masjid dan melarang melakukan kegiatan peribadatan merupakan salah satu bentuk dikriminasi dan upaya menyakiti perasaan muslim, pemerintahan sekarang ini dianggap rezim anti Islam. Pro dan kontrapun muncul, karena ada inkonsistensi kebijakan pemerintah, dimana ada aturan penutupan masjid tetapi tetap membuka pusat-pusat perbelanjaan dengan pembatasan jam operasional. Kebijakan pemerintah inilah yang membuat hilangnya kepercayaan rakyat.

Tabel 2. Aksi Perlawanan Masyarakat di Masa Pandemi Covid-19

No	Bentuk Aksi	Link Chanel	keterangan
	Penolakan penutupan masjid	https://www.youtube.com/watch?v=d62gwFEHjKk	Dilakukan oleh pemuda kecamatan Mangaran
	Pengambilan paksa jenazah covid-19	https://www.youtube.com/watch?v=fWar5k3auqw	Di Karang Malang, Desa Panji Kidul, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo.

Sumber: data diolah oleh peneliti, 2021

¹¹ Vidhyandika D. Perkasa, "Social Distancing Dan Pembangkangan Publik : Perspektif Antropologis Dalam," 2020.

Seperti kejadian yang terjadi di kota santri Situbondo, masyarakat menolak peraturan pemerintah untuk menutup masjid. Nampak dalam video yang dibuat oleh masyarakat yang mengatasnamakan pemuda masjid yang berjumlah empat orang, mereka menganggap bahwa masjid tidak memberikan kontribusi terhadap penambahan jumlah pasien covid, sehingga menolak jikalau masjid ditutup. Sangat jelas ucapan dalam video sebagai berikut;

....."Kami umat Islam Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo menyatakan menolak dan menentang surat Sekda Kabupaten Situbondo tertanggal 2 Juli 2021, khususnya angka 4 yang menyatakan penutupan masjid. Apabila Sekda Kabupaten Situbondo tetap melakukan penutupan masjid, kami nyatakan siap perang..”

Dalam aksi tersebut, nampak bahwa terjadi upaya perlawanan di masyarakat dimasa pandemi covid-19, menolak penutupan masjid dan upaya pengambilan jenazah covid-19 secara paksa. Aksi-aksi kontra masyarakat dilatar belakangi oleh kebijakan peraturan pemerintah, sehingga membuat paradigma berfikir masyarakat juga terbelah. Ada masyarakat yang akomodatif, mampu berfikir logis dan realistis dalam kondisi terkini, tetapi disisi lain ada masyarakat yang ortodok berfikir tradisional cenderung kaku dan kurang fleksibel, umumnya mereka memegang teguh tradisi, itulah yang disebut kelompok anakronisme. Solusi terbaik adalah adanya pelibatan tokoh-tokoh agama didalam menanggulangi pandemi covid ini oleh pemerintah, seperti organisasi kemasyarakatan Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), dan lain sebagainya, sehingga mampu meredam aksi perlawanan masyarakat dan mampu menciptakan suasana tenang dan damai dimasyarakat.

Tabel 3. Faktor penyebab bertambahnya penularan Covid-19

NO	STRUKTURAL	KULTURAL
1.	kekurang sigapan pemerintah dalam upaya merespon penyebaran covid.	Rendahnya kepatuhan masyarakat melaksanakan protokol kesehatan.
2.	Inkonsistensi Pemerintah dalam upaya melakukan pengetatan	Pola dan perilaku kelompok keagamaan masyarakat
3.	melarang umat muslim melakukan ibadah di Masjid, tetapi membuka mall dan super market	Problem “Anakronisme” yaitu paradigma berfikir Agama dan budaya yang tidak sesuai dengan realitas karena mengabaikan rasionalitas dan pembuktian empiris.
4.	Melarang masyarakat mudik lebaran, berkumpul, melarang resepsi pernikahan, tetapi tidak ada pengetatan bagi warga asing ke Indonesia seperti WNA China, India, dsb.	Anakronisme masyarakat dari Prespektif sosiologis merupakan dinamika konsekuensi dari ritualitas keagamaan yang berpegang pada tradisi yang dianggapnya paling benar (ortodoksi)

Sumber: Data diolah peneliti, Agustus 2021

Peran Elit Agama Pesantren di masa Pandemi

Peran elite agama dan fatwa berhasil diaplikasikan dikawasan pesantren dan masyarakat yang memiliki hubungan patron klien. Penyebaran informasi sangat cepat dan efektif melalui media sosial. Peran penting kiai sebagai elit agama di pondok pesantren Salafiyah syafi'iyah Sukorejo Situbondo juga melakukan tindakan mitigasi penularan covid-19 dengan meminta kepada seluruh santri, pengurus pesantren, keluarga pondok pesantren dan masyarakat secara luas, agar lebih mendekatkan diri pada Allah SWT. Dan mengintruksikan untuk membaca doa tolak bala, selain itu pondok pesantren juga membatasi pertemuan wali santri. Dalam rangka ikut serta dalam upaya pencegahan terhadap perkembangan dan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, setelah melakukan kajian dari berbagai aspek, maka dengan ini kami menyampaikan kebijakan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo. Untuk menguatkan intruksi tersebut dituangkan dalam surat maklumat yang berbunyi sebagai berikut:

Tabel. 4. Surat Maklumat mutigasi penyebaran virus covid-19 di Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo

1.	Membatasi ijin pertemuan dan kunjungan walisantri ke pondok pesantren dengan segala macam keperluan sejak tanggal 18 s.d 31 Maret 2020 (14 hari).
2.	Membatasi kegiatan santri ke luar komplek pesantren dan kegiatan pesantren yang akan menghadirkan pembicara dari luar untuk sementara waktu.
3.	Kegiatan pendidikan dan pengajaran yang melibatkan tenaga pendidik dari luar area Sukorejo dalam bentuk tatap muka dialihkan atau diganti dalam bentuk penugasan atau lainnya.
4.	Mewajibkan kepada santri dan Keluarga Besar Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo untuk melakukan upaya <i>bâthiniyah</i> khususnya sejak tanggal 18 s.d 30 Maret 2020 baik melalui lembaga pendidikan, asrama atau lainnya, yaitu
5.	Membaca al-Qur'an atau kitab <i>Riyâdhus Shâlihîn</i> dengan sistem hataman
6.	Membaca <i>Rawâtib al-Haddâd.</i> , Membaca do'a sebagaimana terlampir
7.	Santri yang selesai melaksanakan tugas di luar pondok pesantren atau datang dari bepergian agar melakukan tes pemeriksaan di Klinik Idaman As'adiyah Pondok Pesantren
8.	Santri dan Keluarga Besar Pondok Pesantren agar meningkatkan budaya hidup bersih, gerak badan, dan mengikuti petunjuk yang diatur oleh Bagian Kesehatan
9.	Kegiatan pendidikan dan pelayanan di pondok pesantren mengikuti petunjuk sebagaimana diatur dalam <i>Standar Operasional Prosedur (SOP)</i> dan protokol pada masing-masing bidang
10.	Hal-hal terkait dengan perkembangan upaya pencegahan penyebaran <i>Corona Virus Disease (COVID-19)</i> di Pondok Pesantren akan kami informasi lebih lanjut

11.	Apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan menghubungi Bagian Humas Pesantren atas nama Bapak Samsul A. Hasan 081336262720
-----	---

Sumber: Humas Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, September 2021.

Atas diberlakukannya maklumat kiai, maka pengurus pesantren secara khusus meminta maaf atas ketidak nyamanan karena harus menyesuaikan dengan kondisi terkini, sebagai salah satu bentuk ikhtiar bagi keluarga besar pesantren agar terhindar dari virus covid-19 ini. Ini sesuai dengan yang disampaikan oleh ustadz Samsul Hasan yang menjabat sebagai humas pesantren:

.....”Ya, memang pesantren mengeluarkan maklumat yang berisi intruksi untuk menerapkan aturan ketat ini di pesantren, karena semua ini untuk kesehatan,keselamatan kita semua. Karena mengingat jumlah santri kita sangat besar. Alhamdulillah sampai detik ini semua santri, baik putra maupun santri putri semuanya sehat dan aman. Meski menutup semua akses dari luar, tetapi semua kebutuhan santri dapat terpenuhi.

Dalam konteks fungsi strategis fatwa elit agama di pesantren fatwa atau informasi yang disampaikan oleh elit agama atau kiai pengasuh pesantren menjadi sebuah rekomendasi fundamental bagi seluruh santri, pengurus pesantren, jajaran pendidik mulai ustadz, guru dan dosen dan masyarakat di lingkungan pesantren pada umumnya. Seperti Fatwa yang di keluarkan Kiai Azaim selaku pengasuh pesantren mengeluarkan fatwa yang disebar luaskan melalui berbagai media sosial seperti akun you tube, instagram , facebook, bahkan disebarluaskan live streaming melalui salah satu stasiun TV milik pesantren yang Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Televisi (S3TV).

Tabel. 5. Tabel Pembatasan Sosial di Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah

Pengetatan dilakukan jalur masuk dan keluar bagi seluruh santri. (ada istilah BAJA BERJAMAAH DAN PUJA BERJAMAAH);	
Memberhentian sementara pelaksanaan ritual sosial keagamaan masyarakat seperti ; Tahlilan virtual, menjeguk orang sakit, takziah bagi masyarakat yang meninggal dunia karena covid;	
Pelarangan keluar zona radius 5 km bagi seluruh umama', pengurus pesantren ;	
Santri berada dalam lokasi pesantren dengan penjagaan sangat ketat dan steril dari lingkungan masyarakat sekitar;	
Bagi petugas yang bertugas keluar masuk ke pesantren wajib melakukan swab antigen dan menunjukkan surat vaksinasi;	
Selama pemberlakuan lockdwon, Bagi santri yang bermukim dilakukan kegiatan pengajian rutin yang dipimpin langsung oleh pengasuh pesantren; Sedangkan pembelajaran pendidikan umum dilakukan via online;	

Sumber: Humas Ponpes Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, September 2021

Efektifitas Dakwah Elite Agama

Pengertian fatwa adalah pendapat hukum yang dikeluarkan oleh seorang ahli hukum Islam tentang suatu masalah tertentu. Fatwa mempunyai kontribusi kuat terhadap

hukum Islam dan memiliki andil besar dalam kehidupan umat Islam sehari-hari¹². Penelitian Fatwa di Australia juga dilakukan oleh Ann Black & Nadirsyah Hosen¹³, telah terjadi kebingungan dan kesalahpahaman seputar istilah 'fatwa'. Ini berkaitan dengan maknanya dan juga peran yang dipenuhi fatwa bagi umat Islam, baik di Australia maupun di belahan dunia lain. Ditemukan hasil penelitiannya bahwa, yang pertama dengan mengungkap fatwa melalui eksplorasi tempat khas yang dimiliki dalam hukum Islam, dan kedua dengan mengidentifikasi metodologi yang digunakan oleh para ahli hukum dalam ifta (pemberian fatwa), yang memungkinkan hukum Islam untuk responsif terhadap perkembangan baru dan tantangan kontemporer. Mengingat perluasan kemajuan teknologi, ekonomi dan medis baru-baru ini dan pola migrasi Muslim ke masyarakat sekuler, makalah ini berpendapat bahwa kebutuhan akan fatwa sebenarnya meningkat karena umat Islam berusaha untuk mengakomodasi persyaratan agama Islam dalam lingkungan baru ini. Makalah ini mensurvei sumber otoritas Islam di Australia, menyimpulkan bahwa proses ijtihad kolektif (penalaran hukum independen) paling sesuai dengan keragaman yang merupakan ciri khas Islam di Australia. Namun, ditekankan bahwa ini tidak akan mengurangi keutamaan hukum Australia melainkan akan melengkapinya, karena fatwa memberikan panduan kepada Muslim Australia dalam bidang kehidupan pribadi, individu dan pribadi.

Adapun di Indonesia Peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat dan sosialisasikan melalui fatwa, tausiyah elite Agama pada masa pandemi covid-19 seperti berikut ini;

Tabel. 6. Berbagai Fatwa terkait pandemi covid-19

No	fatwa	tentang
1.	Fatwa MUI No 14 Tahun 2020	Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19
2.	Tausiyah MUI 2 Juli 2021	terkait pelaksanaan ibadah dan Idul Adha masa PPKM Darurat
3.	edaran Menteri Agama No SE 16 tahun 2021	<ul style="list-style-type: none">• Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan• Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
4.	edaran Menteri Agama No SE 17 tahun 2021	<ul style="list-style-type: none">• Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Iduladha• Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sumber: berbagai sumber, data diolah oleh peneliti, 2021.

¹² Alexandre Caero, "The Making of the Fatwa," *Archives de Sciences Sociales Des Religions* 155 (2011): 81–100, <https://doi.org/10.4000/assr.23312>; Alexandre Caeiro, "The Power of European Fatwas: The Minority Fiqh Project and the Making of an Islamic Counterpublic," *International Journal of Middle East Studies* 42, no. 3 (2010): 435–49, <https://doi.org/10.1017/S0020743810000437>.

¹³ Ann Black and Nadirsyah Hosen, "FATWAS: Their Role in Contemporary Secular Australia," *Griffith Law Review* 18, no. 2 (2009): 405–27, <https://doi.org/10.1080/10383441.2009.10854648>.

Dari tabel diatas bahwa fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh elit agama, majelis ulama Indonesia dan menteri Agama Republik Indonesia dirasa kurang efektif untuk menekan upaya perlawanan masyarakat. Maka dari itu diperlukan relasi agama dan Negara. Ulama sebagai elite agama, sedangkan umara dalam penguasa¹⁴. Elit agama dan penguasa merupakan dualisme kekuatan dimasyarakat. Pemerintahan menjadi ranah rasional modern bertugas memenuhi kebutuhan duniawi, sedangkan agama meliputi religiusitas dan keyakinan¹⁵. Acapkali elite agama diperlukan pemerintah untuk menjembatani antara pemegang kekuasaan dan masyarakat, biasanya elite agama yang dekat dengan penguasa, cenderung dijauhi oleh masyarakat, sedang elite agama yang dekat dengan masyarakat akan dijauhi oleh penguasa.

Pemabahasan

Anakronisme Paradigma Subjektivitas Dalam Pemikiran Tradisional

Pengertian anakronisme adalah penempatan peristiwa, tata latar (setting), tokoh maupun dialog yang tidak sesuai dengan tempat dan waktu¹⁶. Fenomena anakronisme yang terjadi di masyarakat merupakan paradigma berfikir Agama dan budaya yang tidak sesuai dengan realitas karena mengabaikan rasionalitas dan pembuktian empiris¹⁷. Anakronisme masyarakat dari Prespektif sosiologis merupakan dinamika konsekuensi dari ritualitas keagamaan yang berpegang pada tradisi yang dianggapnya paling benar (ortodoksi). Joyce Dalsheim menulis artikel yang berkaitan dengan anacronisme di Israel dan Palestina¹⁸. Dalsheim mempunyai gagasan bahwa anakronisme dapat mengganggu pemikiran tentang keadilan sosial, perdamaian, dan pembebasan manusia. Dalam kasus Israel / Palestina gagasan anakronisme dikerahkan di kalangan liberal, progresif dan teoretikus radikal, dan aktivis yang mencari perdamaian dan keadilan sosial yang mengekspresikan permusuhan terhadap pemukim bermotivasi agama dan proyek pemukiman mereka. Salah satu cara di mana mereka membedakan diri dari para pemukim ini adalah dengan menyarankan bahwa tindakan pemukim adalah milik masa lalu. Palestina dipahami sebagai pihak yang terjebak dalam sistem menindas kolonialisme pemukim yang juga milik masa lalu, mencegah mereka dari bergerak maju. Kedua persepsi anakronisme membatasi cara kita dapat berpikir tentang pembebasan manusia dan perdamaian. Artikel ini menyoroti teka-teki tentang siapa atau apa yang menjadi milik masa lalu, dan bagaimana berpikir dalam istilah seperti itu dapat berkontribusi pada produksi kolektif moral tertentu dan produksi permusuhan¹⁹.

Huebner, Daniel R juga meneliti tentang Anakronisme prespektif sosiologis²⁰. Makalah ini memberikan perspektif baru tentang pertanyaan-pertanyaan "anakronisme" dengan bantuan historiografi dan pragmatisme. Historio membuat kasus tentang bagaimana masa kini dialami sebagai beberapa temporalitas, bagaimana pengertian anakronisme bergantung pada dinamika identifikasi tubuh dengan orang lain yang

¹⁴ Nurul Azizah, *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013).

¹⁵ Nor Hasan, "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara," *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 260, <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>.

¹⁶ Ramizi, "Anachronic Potentialities."

¹⁷ García, "Koselleck and the Margins of History: Anachronism, Memory, Latency | Koselleck y Los Márgenes Estéticos de La Historia: Anacronismo, Memoria y Latencia."

¹⁸ Dalsheim, "Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation."

¹⁹ Jan Zienkowski, "Reflexivity in the Transdisciplinary Field of Critical Discourse Studies," *Palgrave Communications*, 2017, <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.7>; García, "Koselleck and the Margins of History: Anachronism, Memory, Latency | Koselleck y Los Márgenes Estéticos de La Historia: Anacronismo, Memoria y Latencia."

²⁰ Huebner, "Anachronism: The Queer Pragmatics of Understanding the Past in the Present."

historis, dan bagaimana pengertian ini dapat menjadi strategi hermeneutik yang provokatif daripada topik yang harus dihindari²¹. Kaum pragmatis menunjukkan bagaimana anakronisme muncul sebagai rasa keterkejutan yang ditempatkan secara sosial dan diwujudkan dalam menghadapi jejak tertentu dari masa lalu di masa kini aktor, dan bagaimana kejutan ini dapat mendorong analisis ke masa lalu yang memanfaatkan komitmen nilai peneliti sebagai sumber daya dalam penyelidikan sosiologis. Makalah ini berusaha membangun alat konseptual untuk hermeneutika pragmatis yang dapat memperkuat akurasi penyelidikan kami terhadap peristiwa sejarah tertentu dan proyek etis dan politik kami yang inklusif secara demokratis untuk merekonstruksi sejarah yang dapat digunakan²².

Peran elite agama terhadap penanggulangan covid-19

Elite agama adalah profil pemuka agama yang memiliki kelebihan ilmu agama dan mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat²³, mampu mengatasi konflik sosial kemasyarakatan, sehingga tokoh agama ini akan di hormati dan di patuhi semua pendapat dan nasehat nya oleh semua lapisan masyarakat²⁴. Bagi santri dan masyarakat yang berada di lingkungan pondok pesantren, elite agama adalah Kiai²⁵. Perintah atau petuah dituangkan dalam sebuah pengumuman yang disebut “maklumat”. Maklumat inilah yang biasanya akan tersebar meluas di kalangan santri dan masyarakat secara luas dengan sangat cepat, melalui relasi patron klien²⁶, berbagai organisasi ikatan alumni santri salafiyah syafi’iyah Sukorejo Situbondo Jawa Timur Indonesia dan melalui berbagai media sosial. Permasalahan pandemi ini juga menjadi tanggung jawab moral elit agama untuk memitigasi penyebaran virus covid-19.

Dalam konteks ini, kedudukan elit agama dalam menanggulangi penyebaran covid bagaikan pisau bermata dua. Disatu sisi, dogma tersebut mempunyai kebenaran yang absolut dalam beragama, dilain sisi pemikiran semacam itu bisa menyebabkan masyarakat menjadi lengah sehingga dapat merendahkan kewaspadaan, kemudian menyebabkan penyebaran virus covid akan semakin meluas. Pengaruh kuat yang dimiliki oleh elit agama dalam memanfaatkan kemajuan teknologi, sehingga informasi yang disampaikan dengan mudah tersebar melalui berbagai media sosial dengan sangat cepat diakses oleh banyak masyarakat. sehingga respon dari masyarakatpun juga beragam ada yang akomodatif dan yang kontraindikatif. masyarakat yang akomodatif akan cenderung mengikuti kebijakan dan peraturan yang tetapkan pemerintah, sedangkan masyarakat yang kontraproduktif akan berdampak terhadap aksi perlawanan masyarakat.

²¹ Jan Zienkowski and Benjamin De Cleen, “The Polyphonic Critique of Trade Unions: Unpacking the Logics of Union Critical Discourse,” *Critical Discourse Studies* 18, no. 5 (2021): 519–37, <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1769699>; Huebner, “Anachronism: The Queer Pragmatics of Understanding the Past in the Present.”

²² Ramizi, “Anachronic Potentialities”; Nancy armstrong, “Realism and Anachronism.”

²³ Mohammad Kosim, “KYAI DAN BLATER (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura),” *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 149–60.

²⁴ Nurul Azizah, Joseph Okwesili Nkwede, and Mohammad Armoyu, “The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics,” 2021, <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.

²⁵ Abdul Chalik, “Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur,” *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 364, <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>.

²⁶ Petros G. Sekeris, “Endogenous Elites: Power Structure and Patron-Client Relationships,” *Economics of Governance*, 2011, <https://doi.org/10.1007/s10101-010-0093-8>; Luis Roniger, “Patron-Client Relations, Social and Anthropological Study Of,” in *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12125-7>; Ward Berenschot, “The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia’s Patronage Democracy,” *Comparative Political Studies*, 2018, <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.

Efektifitas Pengaruh fatwa tokoh agama

Kesimpulan

Respon dan peran strategis elite agama secara umum ada dua sisi, yakni; akomodatif- responsif sedangkan sisi yang kedua komunitas apatis-kontradiktif yang menganggap bahwa pandemi covid -19 sebagai bentuk ketakutan manusia terhadap penyakit, sedangkan kelompok akomodatif- parsipatif terdiri dari beberapa elite agama yang secara rasional memberikan maklumat memitigasi covid-19 seperti patuh terhadap protokol kesehatan, memakai masker, menyediakan tempat cuci tangan, penyemprotan disinfektan secara rutin di seluruh kawasan pesantren. Pengaruh elit agama menjadi magnet utama bagi santri dan masyarakat luas pada umumnya untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penularan dan upaya memutus mata rantai virus covid-19 juga beragam, semuanya didasari dari paradigma berfikir paham keislaman yang di anut masing-masing pesantren, sehingga ada yang akomodatif-konservatif ada juga yang resisten kontraindikasi.

Efektifitas fatwa agama bagi kalangan santri di pondok pesantren atau relasi kuat patron klien sangat kuat, sedangkan untuk kalangan masyarakat umum tidak efektif karena kurang sosialisai peraturan pemerintah tentang pembatasan kegiatan masyarakat. Bagi sebagian umat Islam peraturan penutupan masjid dianggap salah satu bentuk diskriminasi agama, sehingga terjadi aksi perlawanan publik. Maka dari itu diperlukan upaya pemerintah untuk melibatkan elit-elite agama untuk memberikan sosialisasi peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial masyarakat. Sehingga mampu mencegah penularan covid-19 dan meredam resistensi publik.

Tulisan ini menyarankan perlunya sinergisitas antara elite agama dan pemerintah, sehingga mampu meningkatkan rasionalitas masyarakat terhadap pemahaman agama dan budaya, tidak terjebak dalam pemikiran ortodok apalagi dimasa pandemi covid-19.

Daftar Referensi

- Alexandre Caero. "The Making of the Fatwa." *Archives de Sciences Sociales Des Religions* 155 (2011): 81–100. <https://doi.org/10.4000/assr.23312>.
- Algahtani, Fahad D., Mohamed Ali Alzain, Najoua Haouas, Khadijah Angawi, Bandar Alsaif, Adel Kadri, Mohamed A. Dkhil, Mejudi Snoussi, and Rafat Zrieq. "Coping during Covid-19 Pandemic in Saudi Community: Religious Attitudes, Practices and Associated Factors." *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2021. <https://doi.org/10.3390/ijerph18168651>.
- Azizah, Nurul. *Artikulasi Politik Santri: Dari Kyai Menjadi Bupati*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Azizah, Nurul, Joseph Okwesili Nkwede, and Mohammad Armoyu. "The Octopus-like Power of Pesantren Dynasty in the Dynamics of Local Politics," 2021. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.1962056>.
- Barmania, Sima, and Michael J. Reiss. "Health Promotion Perspectives on the COVID-19 Pandemic: The Importance of Religion." *Global Health Promotion* 28, no. 1 (2021): 15–22. <https://doi.org/10.1177/1757975920972992>.
- Berenschot, Ward. "The Political Economy of Clientelism: A Comparative Study of Indonesia's Patronage Democracy." *Comparative Political Studies*, 2018. <https://doi.org/10.1177/0010414018758756>.
- Black, Ann, and Nadirsyah Hosen. "FATWAS: Their Role in Contemporary Secular Australia." *Griffith Law Review* 18, no. 2 (2009): 405–27. <https://doi.org/10.1080/10383441.2009.10854648>.

- Caeiro, Alexandre. "The Power of European Fatwas: The Minority Fiqh Project and the Making of an Islamic Counterpublic." *International Journal of Middle East Studies* 42, no. 3 (2010): 435–49. <https://doi.org/10.1017/S0020743810000437>.
- Chalik, Abdul. "Elite Lokal Yang Berbasis Pesantren Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 23, no. 2 (2016): 364. <https://doi.org/10.19105/karsa.v23i2.744>.
- Cover, Rob. "Identity in the Disrupted Time of COVID-19: Performativity, Crisis, Mobility and Ethics." *Social Sciences & Humanities Open* 4, no. 1 (2021): 100175. <https://doi.org/10.1016/j.ssaho.2021.100175>.
- Creswell, John W. *Research Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Design Fourth Edition*. Sage Publications, 2014.
- Dalsheim, Joyce. "Anachronism and Morality: Israeli Settlement, Palestinian Nationalism, and Human Liberation." *Theory, Culture & Society* 30, no. 3 (2013): 29–60. <https://doi.org/10.1177/0263276412460697>.
- García, A.R. "Koselleck and the Margins of History: Anachronism, Memory, Latency | Koselleck y Los Márgenes Estéticos de La Historia: Anacronismo, Memoria y Latencia." *Revista de Historiografía*, 2021. <https://doi.org/10.20318/revhisto.2020.5830>.
- Hasan, Nor. "Agama Dan Kekuasaan Politik Negara." *KARSA: Jurnal Sosial Dan Budaya Keislaman* 22, no. 2 (2015): 260. <https://doi.org/10.19105/karsa.v22i2.532>.
- Huebner, Daniel R. "Anachronism: The Queer Pragmatics of Understanding the Past in the Present." *American Sociologist*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s12108-021-09509-w>.
- Kosim, Mohammad. "KYAI DAN BLATER (Elite Lokal Dalam Masyarakat Madura)." *Karsa: The Journal of Social and Islamic Culture* 12, no. 2 (2012): 149–60.
- Mahmood, Qaisar Khalid, Sara Rizvi Jafree, Malik Muhammad Sohail, and Muhammad Babar Akram. "A Cross-Sectional Survey of Pakistani Muslims Coping with Health Anxiety through Religiosity during the COVID-19 Pandemic." *Journal of Religion and Health*, 2021. <https://doi.org/10.1007/s10943-021-01218-5>.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. SAGE Publications. 2nd ed. Vol. Second Edi. California, 1994.
- Miles, Matthew B, A. Michael Huberman, and Johnny Saldana. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third Edition. The SAGE Handbook of Applied Social Research Methods, 2014.
- Nancy armstrong. "Realism and Anachronism." *Novel, Inc*, 2020. <https://doi.org/10.1215/00295132-8309497>.
- Ramizi, Erag. "Anachronic Potentialities." *Diacritics* 48, no. 2 (2020): 4–16. <https://doi.org/10.1353/dia.2020.0007>.
- Roniger, Luis. "Patron-Client Relations, Social and Anthropological Study Of." In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences: Second Edition*, 2015. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.12125-7>.
- Satuan Tugas Penanganan COVID-19. *Data Sebaran, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 19–22 (2021)*.
- Sekeris, Petros G. "Endogenous Elites: Power Structure and Patron-Client Relationships." *Economics of Governance*, 2011. <https://doi.org/10.1007/s10101-010-0093-8>.
- Subakhi Kusuma Dewi. "December 2020." *DINIKA Academic Journal of Islamic Studies* 5, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.36548/jismac.2020.4>.
- Tjipto Subadi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Erlina Farida Hidayati. 1st ed. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.
- Vidhyandika D. Perkasa. "Social Distancing Dan Pembangkangan Publik : Perspektif Antropologis Dalam," 2020.

- Zienkowski, Jan. "Reflexivity in the Transdisciplinary Field of Critical Discourse Studies." Palgrave Communications, 2017. <https://doi.org/10.1057/palcomms.2017.7>.
- Zienkowski, Jan, and Benjamin De Cleen. "The Polyphonic Critique of Trade Unions: Unpacking the Logics of Union Critical Discourse." *Critical Discourse Studies* 18, no. 5 (2021): 519–37. <https://doi.org/10.1080/17405904.2020.1769699>.